RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI

Bulan: Agustus 2020

Oleh: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887
Fax : (021) 5715846
e-mail: perpustakaan@dpr.go.id
Web: perpustakaan.dpr.go.id

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Hasil Evaluasi yang Telah Disepakati dalam Rapat Paripurna DPR (16 Juli 2020)

Tahap Terdaftar Hasil Evaluasi

Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai diantaranya adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti kuitansi, dan dokumen yang bersifat perdata.

Peraturan Bea Meterai masih belum mengatur secara lengkap mengenai transaksi Bea Meterai, hal ini disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi belum diaturnya kontrak elektronik pada transaksi e-commerce, beberapa faktor tersebut adalah karena pada saat itu internet masih belum berkembang pesat di Indonesia, selain itu perkembangan transaksi elektronik masih belum pesat, khususnya hal ini berkesinambungan dengan faktor yang pertama, dan juga masih belum adanya peraturan yang memfasilitasi dan mengakui adanya transaksi e-commerce pada saat itu. Berbeda dengan saat ini yang sudah ada peraturan yang mengakui adanya transaksi elektronik dan sah menjadi bukti.

Dokumen-dokumen yang harus dikenakan oleh Bea Meterai pada UUBM hanyalah dokumen yang terdapat fisiknya atau dokumen yang sudah diprint. UU ITE memfasilitasi dengan diaturnya dokumen elektronik yang digunakan transaksi elektronik. Berdasarkan hal pemerintah mencoba mengatur lebih jauh mengenai transaksi elektronik. Maka Bea Meterai sudah harus dikenai oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang yang menjadikan kontrak elektronik menjadi salah satu objek Bea Meterai, dengan menggunakan QR code atau menggunakan software meterai tempel untuk memudahkan membubuhkan meterai pada perjanjian atau kontrak elektronik. Selain itu pemerintah merevisi UUBM dengan cara memasukkan beberapa pasal mengenai kontrak elektronik dan menjadikan dokumen elektronik sebagai salah satu objek yang dapat dikenakan Bea Meterai.

Fungsi bea meterai dalam surat perjanjian adalah sebagai pajak atas dokumen secara pasti telah ditegaskan dalam UUBM 1985. Objek dari meterai adalah dokumen. Surat perjanjian yang tidak menggunakan Bea Meterai berakibat pada surat perjanjian tersebut dianggap tidak bermeterai dan sesuai dengan ketentuan UUBM 1985 wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan permeteraian kemudian. Pengaruhnya jika surat perjanjian tidak bermeterai adalah tidak dapat dilayani oleh pejabat-pejabat umum dalam lalu lintas hukum karena dianggap tidak memenuhi prosedur hukum sebagaimana tersurat dalam UUBM 1985. Sah tidaknya surat perjanjian bukan ditentukan oleh ada tidaknya meterai namun oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Artinya meterai bukan patokan yang menentukan keabsahan surat perjanjian. Jika isi perjanjiannya tidak benar, maka walaupun menggunakan ribuan meterai sama sekali tidak mempunyai kekuatan yuridis

Pada dasarnya bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang dipungut berdasarkan ketentuan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu dengan undang-undang. Hanya saja memang aturan bea meterai secara benar belum banyak dipahami oleh masyarakat sehingga masih banyak yang tidak mengetahui bahwa bea meterai merupakan pajak tidak langsung yang berfungsi sebagai sarana untuk memasukkan penerimaan negara.

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	DPR SEPAKAT SEGERA MEREVISI UU BEA METERAI	https://mediaindonesia.com/rea \nd/detail/244919-dpr-sepakat-se \ngera-merevisi-uu-bea-meterai \n
Berita	DPR YAKIN RUU BEA MATERAI BISA DISAHKAN PADA BULAN DEPAN	https://nasional.kontan.co.id/ \nnews/dpr-yakin-ruu-bea-materai \n-bisa-disahkan-pada-bulan-depa \nn
Berita	DRAF RUU KENAIKAN BEA MATERAI JADI RP10 RIBU MASIH DI DPR	https://www.cnnindonesia.com/e \nkonomi/20191118104633-532-4492 \n39/draf-ruu-kenaikan-bea-mater \nai-jadi-rp10-ribu-masih-di-dpr \n
Berita	LIMA POIN USULAN PEMERINTAH DI RUU BEA MATERAI	https://www.hukumonline.com/be \nrita/baca/lt5d5e3f9e6e9a5/lima \n-poin-usulan-pemerintah-di-ruu \n-bea-materai/
Berita	PEMBAHASAN REVISI UU BEA METERAI BERLANJUT: BEA METERAI	https://news.ddtc.co.id/pembah \nasan-revisi-uu-bea-meterai-ber \nlanjut-23354
Berita	RUU BEA MATERAI BERPIHAK PADA UMKM DAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	https://www.kemenkeu.go.id/pub \nlikasi/berita/ruu-bea-meterai- \nberpihak-pada-umkm-dan-masyara \nkat-berpenghasilan-rendah/
Berita	RUU BEA METERAI SEGERA DISAHKAN, INI DAMPAKNYA KEPADA MASYARAKAT	https://nasional.kontan.co.id/ \nnews/ruu-bea-meterai-segera-di \nsahkan-ini-dampaknya-kepada-ma \nsyarakat
Jurnal	FORMULASI PENGATURAN BEA METERAI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA	http://hukum.studentjournal.ub \n.ac.id/index.php/hukum/article \n/view/1994
Jurnal	FORMULASI PENGATURAN BEA METERAI PADA TRANSAKSI ECOMMERCE DI INDONESIA	https://media.neliti.com/media \n/publications/118166-ID-none.p \ndf
Jurnal	KEKUATAN HUKUM AKTA PERJANJIAN TANPA BEA MATERAI	http://e-journal.metrouniv.ac. \nid/index.php/istinbath/article \n/view/742/658
Jurnal	MENGUKUR KELEBIHAN DAN KELEMAHAN RUU BEA METERAI	http://berkas.dpr.go.id/puskaj \nianggaran/buletin-apbn/public- \nfile/buletin-apbn-public-87.pd \nf
Jurnal	POTENSI PENERIMAAN NEGARA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG BEA METERAI	http://pajak.vokasi.ui.ac.id/p \notensi-penerimaan-negara-dalam \n-rancangan-undang-undang-bea-m \neterai/
Jurnal	POTENSI PENERIMAAN NEGARA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG BEA METERAI	http://pajak.vokasi.ui.ac.id/p \notensi-penerimaan-negara-dalam \n-rancangan-undang-undang-bea-m \neterai/
Jurnal	TINJAUAN YURIDIS FUNGSI BEA MATERAI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SURAT PERJANJIAN	http://webcache.googleusercont \nent.com/search?q=cache:778flas \nF4QAJ:jurnal.unissula.ac.id/in \ndex.php/kimuh/article/download \n/8792/4007+&cd=8&hl=id&ct=clnk \n&gl=id
Buku	ATURAN BEA MATERAI	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=450 \n7&keywords=materai
Buku	ATURAN BEA MATERAI DAN KEBIJAKSANAAN PAJAK	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=390 \n1&keywords=materai
Buku	BEA METERAI DI INDONESIA	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=307 \n31&keywords=materai

Buku	BUKU PANDUAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH	http://spi.uin-alauddin.ac.id/\nwp-content/uploads/2016/09/9-B\nEA-MATERAI.pdf
Dokumen	LAPSING RAKER KOMISI XI DG MENKEU	http://dpr.go.id/dokakd/dokume\nn/K11-LAPSING-RAKER-DENGAN-MEN\nKEU-TANGGAL-21-AGUSTUS-2019-15\n69909840.pdf
Dokumen	LAPSING RAPAT PANJA KOMISI XI DPR RI RUU BEA MATERAI	http://dpr.go.id/doksileg/pros\nes3/RJ3-20191002-010408-7735.p\ndf
Dokumen	LAPSING RAPAT PANJA KOMISI XI DPR RI RUU BEA MATERAI	http://dpr.go.id/doksileg/pros\nes3/RJ3-20191002-123013-8794.p\ndf
Dokumen	LAPSING RAPAT PANJA KOMISI XI DPR RI RUU BEA MATERAI	http://dpr.go.id/doksileg/pros\nes3/RJ3-20191002-010739-4921.p\ndf
Dokumen	LAPSING RAPAT PANJA KOMISI XI DPR RI RUU BEA MATERAI	http://dpr.go.id/doksileg/pros\nes3/RJ3-20191002-010616-9771.p\ndf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2014 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA METERAI	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2014/65~PMK.03~2014Per.\nHTM
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN	https://jdih.kemenkeu.go.id/fu\nllText/2014/70~PMK.03~2014Per.\nHTM#:~:text=Undang%2DUndang%20\nBea%20Meterai%20adalah,atau%20\npihak%2Dpihak%20yang%20berkepe\nntingan.
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/53201/pp-no-24-tahu\nn-2000
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 7 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI	https://peraturan.bpk.go.id/Ho\nme/Details/57025/pp-no-7-tahun\n-1995
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI	http://www.dpr.go.id/dokjdih/d\nocument/uu/UU_1985_13.pdf
Surat kabar	POTENSI BESAR BEA METERAI DI ERA EKONOMI DIGITAL	https://cita.or.id/potensi-bes\nar-bea-meterai-di-era-ekonomi-\ndigital/
Surat kabar	SATUKAN LAGI KEPINGAN RUPIAH YANG HILANG DARI BEA MATERAI	https://www.pajak.go.id/id/art\nikel/satukan-lagi-kepingan-rup\niah-yang-hilang-dari-bea-mater\nai
Surat kabar	TARIF TUNGGAL BEA METERAI & PENERIMAAN NEGARA	https://epaper.dpr.go.id/index\n/detail/id/12312
Surat kabar	URGENSI PENGESAHAN RUU TENTANG BEA METERAI	https://www.alinea.id/kolom/ur\ngensi-pengesahan-ruu-tentang-b\nea-meterai-b1Xm29ndj